

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Indikator keberhasilan pembangunan yaitu ketika pertumbuhan ekonomi stabil dan ketimpangan rendah. Peran pembangunan dalam kaitannya dengan penurunan ketimpangan terdiri dari seluruh aspek perekonomian yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada.

Salah satu penyebab ketimpangan di negara berkembang yaitu kesenjangan antara warga yang berpendapatan relatif tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Faktor yang mendorong adanya ketimpangan di Jawa Tengah menurut Hidayah & Tallo (2020) antara lain migrasi kelompok produktif dan terdidik ke daerah berkembang, adanya investasi ke daerah yang lebih maju, serta kebijakan pemerintah yang fokus pada kegiatan sosial dan ekonomi kapital di daerah berkembang. Pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB per kapita dapat menggunakan perhitungan Indeks Williamson. Perkembangan Indeks Williamson tiap Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 ditampilkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Indeks Williamson tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

SWP	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barlingmascakep	0,72	0,72	0,72	0,70	0,68	0,66
Purwomanggung	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34
Subosukawonosraten	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Banglor	0,07	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00
Wanarakuti	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68
Kedungsepur	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68
Bregasmalang	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Petanglong	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1, nampak bahwa Indeks Williamson tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah cenderung tidak banyak berubah. Terjadi sedikit penurunan ketimpangan di kawasan Barlingmascakep, Banglor, dan Wanarakuti, sedangkan sedikit peningkatan ketimpangan terjadi di kawasan Purwomanggung. Nampak bahwa ketimpangan terendah ada di kawasan Banglor sebesar 0,07 dan berangsur turun. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi antarkabupaten yang merata. Terdapat tiga SWP yang memiliki Indeks Williamson di atas 0,5; yaitu Barlingmascakep, Wanarakuti, dan Kedungsepur. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut masih tinggi (BPS, 2021).

Salah satu faktor yang berkaitan dengan ketimpangan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan perekonomian di suatu negara yang diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). Simon Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat. Meningkatnya ketimpangan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi disebabkan karena pertumbuhan yang belum sepenuhnya merata yang menyebabkan ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin, baik dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Setelah mencapai kondisi

tertentu, ketimpangan cenderung menurun seiring dengan peningkatan PDB per kapita (Mankiw, 2006). Perkembangan PDRB tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 ditampilkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 PDRB (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010 tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barlingmascakep	30.600.000 (4,91)	32.400.000 (5,86)	34.100.000 (5,29)	35.500.000 (5,02)	37.100.000 (5,21)	38.500.000 (5,07)
Purwomanggung	11.200.000 (4,93)	11.800.000 (5,11)	12.400.000 (5,23)	13.100.000 (5,07)	13.700.000 (5,26)	14.400.000 (5,37)
Subosukawonosraten	20.400.000 (5,43)	21.500.000 (5,56)	22.700.000 (5,43)	24.000.000 (5,67)	25.300.000 (5,70)	26.800.000 (5,73)
Banglor	11.300.000 (4,77)	11.900.000 (5,43)	13.700.000 (14,41)	14.500.000 (6,48)	15.300.000 (5,13)	15.600.000 (4,62)
Wanarakuti	34.114.000 (4,63)	35.700.000 (5,00)	37.000.000 (4,36)	38.500.000 (4,76)	40.200.000 (4,93)	41.900.000 (4,99)
Kedungsepur	31.700.000 (5,21)	33.500.000 (5,60)	35.400.000 (5,27)	37.700.000 (5,90)	40.000.000 (5,83)	42.400.000 (5,76)
Bregasmalang	16.600.000 (5,22)	17.500.000 (5,62)	18.500.000 (5,48)	19.600.000 (5,65)	20.600.000 (5,58)	21.800.000 (5,72)
Petanglong	10.100.000 (5,25)	10.500.000 (5,07)	11.100.000 (5,19)	11.700.000 (5,44)	12.400.000 (5,72)	13.100.000 (5,41)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa PDRB tiap SWP mengalami peningkatan dan pertumbuhan PDRB tiap kawasan cenderung berfluktuasi. Selama tahun 2014-2019, PDRB kawasan Wanarakuti dan Kedungsepur merupakan yang paling tinggi di antara kawasan lain, tetapi pertumbuhan PDRB untuk dua kawasan tersebut cenderung tidak stabil, di mana pertumbuhan PDRB Kedungsepur mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Banglor menjadi kawasan dengan nilai dan pertumbuhan PDRB terendah. Rendahnya PDRB dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, salah satunya tingkat permintaan dari daerah lain terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah yang ada di sekitar daerah tersebut (BPS, 2021).

Selain PDRB, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap ketimpangan adalah upah. Upah merupakan suatu penghargaan atas pencapaian seseorang dalam bekerja yang diberikan dalam wujud uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan. Menurut Istikharoh, Prijanto, & Destiningsih (2020), upah minimum yang meningkat akan berpengaruh terhadap ketimpangan karena upah yang diterima di tiap daerah masih berbeda-beda. Oleh karena itu, upaya pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan upah minimum yang masih rendah agar disamakan dengan daerah yang upah minimumnya tinggi. Perkembangan Jumlah dan Rata-rata Upah Minimum tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 ditampilkan pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Jumlah dan Rata-rata Upah Minimum tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barlingmascapek	5.043.000	5.758.600	5.317.100	7.481.489	8.135.409	8.823.558
	1.008.600	1.151.720	1.329.275	1.496.298	1.627.082	1.764.712
Purwomanggung	5.247.000	5.975.000	6.690.000	7.356.000	8.037.000	8.683.527
	1.049.400	1.195.000	1.338.000	1.471.320	1.607.400	1.736.705
Subosukawonosraten	7.436.600	8.244.400	9.630.500	10.479.360	11.414.475	12.342.761
	1.062.371	1.177.771	1.375.785	1.497.051	1.630.639	1.763.252
Banglor	1.994.000	2.300.000	2.628.500	2.846.100	3.099.000	3.350.000
	997.000	1.150.000	1.314.250	1.423.050	1.549.500	1.675.000
Wanarakuti	3.163.027	3.706.500	4.268.200	4.761.400	5.216.860	5.665.499
	1.054.342	1.235.500	1.422.733	1.587.133	1.738.953	1.888.500
Kedungsepur	7.217.700	8.469.450	9.659.553	10.576.712	11.500.966	12.438.806
	1.202.950	1.411.575	1.609.925	1.762.785	1.916.828	2.073.134
Bregasmalang	4.132.603	4.720.950	5.393.000	5.864.600	6.377.500	6.892.850
	1.033.151	1.180.238	1.348.250	1.466.150	1.594.375	1.723.213
Petanglong	3.335.000	3.382.000	4.430.500	4.810.448	5.236.716	5.666.808
	1.111.667	1.277.333	1.476.833	1.603.483	1.745.572	1.888.936

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Upah Minimum tiap SWP mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selama 2014-2019, Banglor menjadi kawasan dengan jumlah dan rata-rata UMK terendah di mana UMK Kabupaten Rembang senilai Rp. 1.660.00 dan Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.610.000, masing-masing daerah mempunyai keunggulan pada sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sementara itu, jumlah dan rata-rata UMK tertinggi ada pada kawasan Kedungsepur dan Subosukawonosraten yang nilainya juga tidak jauh berbeda.

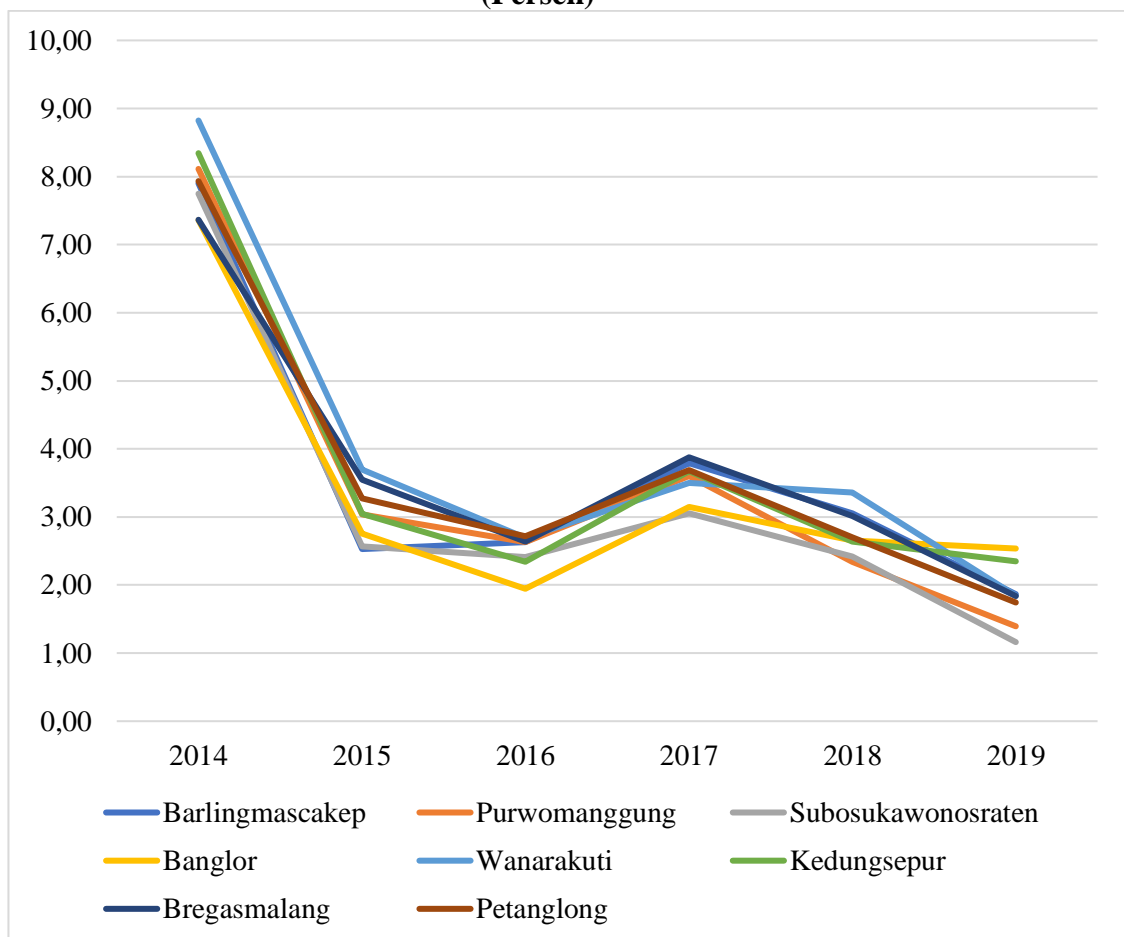
Kawasan Kedungsepur ada pada Kota Semarang dengan UMK sebesar Rp. 2.498.587 di mana sektor informasi dan komunikasi yang paling unggul, sedangkan Subosukawonosraten ada pada Kabupaten Karanganyar senilai Rp. 1.833.000 yang unggul pada sektor industri pengolahan. Adanya kesenjangan upah tersebut disebabkan karena perbedaan nilai upah antara pekerja berpendapatan rendah terhadap pekerja dengan penghasilan rata-rata. Oleh sebab itu, peningkatan upah tidak bisa dirasakan oleh pekerja dengan pendapatan rendah yang didominasi oleh kelompok pekerja di sektor pertanian dengan pendidikan rendah (BPS, 2021).

Selain upah, inflasi merupakan faktor yang berkaitan dengan ketimpangan. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan. Menurut Rozali (2020), inflasi akan menurunkan permintaan, yang menyebabkan penurunan produksi. Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja akan berkurang, sehingga akan muncul pengangguran dan ketimpangan. Inflasi tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 akan ditampilkan pada Grafik 1.1.

Nampak pada Grafik 1.1 bahwa inflasi tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 cenderung berfluktuasi. Tahun 2014 adalah tahun dengan inflasi

tertinggi bagi semua SWP, dan inflasi cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, kawasan Subosukawonosraten menjadi kawasan dengan nilai inflasi terendah. Inflasi dengan nilai tertinggi ada pada kawasan Banglor. Perbedaan nilai inflasi antara dua kawasan tersebut bisa terjadi karena pendapatan uang yang kian bertambah tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya produksi barang. Jika barang yang diproduksi sedikit, maka sedikit pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan terjadilah ketimpangan (BPS, 2021).

Grafik 1. 1 Inflasi tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi daerah biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Williamson menggunakan data PDRB per kapita untuk mengukur ketimpangan tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah. Ditemukan beberapa kawasan SWP masih mengalami ketimpangan yang tinggi. Kawasan Wanarakuti dan Kedungsepur adalah SWP dengan nilai ketimpangan tertinggi pada tahun 2019. Maka dari itu, diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai PDRB dan pertumbuhan PDRB tiap SWP di Jawa Tengah tahun 2014-2019 cenderung mengalami fluktuasi. Kawasan Banglor menjadi kawasan dengan PDRB dan pertumbuhan PDRB terendah. Meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan adalah salah satu cara untuk meningkatkan PDRB di suatu daerah. Di sisi lain, upah minimum tertinggi ada pada kawasan Kedungsepur. Upah bisa menjadi motivasi bagi para pekerja untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja sehingga masyarakat menjadi sejahtera, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, dan ketimpangan pendapatan berkurang.

Selain pertumbuhan PDRB dan upah minimum, faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah inflasi. Inflasi yang terjadi di SWP Provinsi Jawa Tengah cenderung berfluktuasi dan menurun pada tahun 2019. Nilai inflasi akan terus berkurang jika harga-harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan. Inflasi dapat memperparah tingkat kemiskinan dan menyebabkan pengangguran sehingga menciptakan ketimpangan. Berdasarkan permasalahan dan

latar belakang masalah, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan PDRB, upah minimum, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pertumbuhan PDRB, upah minimum, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang keadaan ketimpangan pendapatan kepada pemerintah serta pihak-pihak yang terkait untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan tiap SWP di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berminat untuk meneliti ketimpangan pendapatan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan PDRB, upah minimum, dan inflasi. Selanjutnya, akan ditampilkan beberapa penelitian terdahulu dan dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data, interpretasi hasil regresi, dan intrepretasi ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran guna perbaikan dan referensi penelitian selanjutnya dalam pembahasan ruang lingkup yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN